

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persatuan Islam pada tahun 1923¹ didirikan di Bandung, dalam perjalanannya mengalami stagnasi yang terlihat jelas, walaupun kebanyakan orang memandang Persatuan Islam sebagai organisasi Islam yang memang keras dalam penerapan suatu ketentuan yang berbeda dalam masyarakat. Persis yang berperan dan memposisikan diri dalam purifikasi (pemurnian) terhadap praktek keislaman yang mengundang pada pembaharuan pemikiran ke-Islaman (*harokah tajdid*)². Persis dianggap sebagai sebuah jamiyyah Diniyyah (organisasi keagamaan) yang selalu tegas dalam menentukan sikapnya terhadap budaya Indonesia tradisional, budaya barat dan terhadap pemikiran serta praktek Islam tradisional³.

Sebagai organisasi da'wah, Persis selain harus mampu, konsisten, dan bertahan pada prinsip-prinsip khittah perjuangan dalam memberantas TBC⁴ (Takhayul, Bid'ah, Churafat) dan bentuk-bentuk kemusyrikan lainnya, Persis juga harus lebih solid dan dinamis menghadapi tantangan da'wah yang kian hari kian berat dan semakin kompleks.

¹ PP Persis. 2005. *Qanun Asasi-Qanun Dakhili:Penjelasan Qanun Asasi-Qanun Dakhili, Pedoman Kerja, Program Jihad 2005-2010*. Bandung : Pimpinan Pusat Persatuan Islam. Hlm:6

Abu Al-Ghifari. 2002. *Sejarah Pemuda Persis*. Bandung : Mujahid Press. Hal:21

³Badri Khairuman. 2002. *Pandangan Keagamaan Persis: sejarah, Pemikiran dan Fatwa Ulamanya*. Bandung: Granada. Hal:2

⁴ PP Persis. *Op.cit.*, 2005 : 54

Kepemimpinan Persis periode pertama (1923-1942) berada di bawah pimpinan H. Zamzam, H. Muhammad Yunus, Ahmad Hassan, dan Muhammad Natsir yang menjalankan roda organisasi pada masa penjajahan kolonial Belanda, dan menghadapi tantangan yang berat dalam menyebarkan ide-ide dan pemikirannya⁵.

Pada masa pendudukan Jepang (1942-1945), ketika semua organisasi Islam dibekukan, para pimpinan dan anggota Persis bergerak sendiri-sendiri menentang usaha Niponisasi dan pemusyrikan ala Jepang. Hingga menjelang proklamasi kemerdekaan Pasca kemerdekaan. Persis mulai melakukan reorganisasi untuk menyusun kembali system organisasi yang telah dibekukan selama pendudukan Jepang, Melalui reorganisasi tahun 1941, kepemimpinan Persis dipegang oleh para ulama generasi kedua diantaranya KH. Muhammad Isa Anshari sebagai ketua umum Persis (1948-1960), K.H.E. Abdurahman, Fakhruddin al-Khahiri, K.H.O. Qomaruddin Saleh, dll. Pada masa itu Persis dihadapkan pada pergolakan politik yang belum stabil; pemerintah Republik Indonesia sepertinya mulai tergiring ke arah demokrasi terpimpin yang dicanangkan oleh Presiden Soekarno dan mengarah pada pembentukan negara dan masyarakat dengan ideology Nasionalis, Agama, Komunis (Nasakom)⁶.

Setelah berakhirnya periode kepemimpinan K.H. Muhammad Isa Anshary, kepemimpinan Persis dipegang oleh K.H.E. Abdurahman (1962-1982) yang dihadapkan pada berbagai persoalan internal dalam organisasi maupun persoalan eksternal dengan munculnya berbagai aliran keagamaan yang bersebrangan

⁵ Dadan Wildan. 1999. *Yang da'i yang Politikus*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hlm:12

⁶ *Ibid.*, Hlm:13

dengan Persis seperti aliran pembaharu Isa Bugis, Islam Jama'ah, Darul Hadits, Inkarus Sunnah, Syi'ah, Ahmadiyah dan faham sesat lainnya⁷. K.H Abdurrahman dalam peranannya dalam organisasi Persis, Beliau mempunyai kelebihan dalam kecermatannya menetapkan hukum dan ijtihadnya dengan landasan dalil yang selalu kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kepemimpinan K.H.E. Abdurrahman dilanjutkan oleh K.H.A. Latif Muchtar, MA. (1983-1997) dan K.H. Shiddiq Amien (1997-2005) yang merupakan proses regenerasi dari tokoh-tokoh Persis kepada eksponen organisasi otonom kepemudaannya (Pemuda Persis).

Persis sebagai sebuah Jam'iyah memiliki tujuan yang sangat ideal, dalam perangkat menuju keidealan tersebut Persis mempunyai Qanun Asasi⁸ dan *Qanun Dakhili*⁹. Qanun Asasi dan *Qanun Dakhili* ini berfungsi sebagai pijakan dasar dan panduan hidup berjama'ah, berimamah dan berimarah menuju sebuah tatanan demi terwujudnya kesatuan pemikiran, kesatuan rasa, kesatuan suara, dan kesatuan usaha dalam mengembalikan umat Islam kepada tuntunan al-Qur'an dan as-Sunnah¹⁰.

Dalam struktur kejamiyahan Persis bahwasanya pimpinan Jam'iyah terdiri dari Pimpinan pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan

⁷ *Ibid.*, Hlm: 14

⁸ Qanun Asasi merupakan landasan idiil (ideologi), yang mana memuat tentang hal-hal yang mendasar mencakup didalamnya antara lain Wajah dan wajah Persis yang terdiri dari nama, waktu dan kedudukan, asas, tujuan, sifat, dan rencana jihad; Jama'ah, Imamah dan imarah yang mengatur struktur kepemimpinan, pembedaan dan kelembagaan serta permusyawaratan, dan diakhiri dengan aturan mengenai kekayaan dan pembiayaan, kedaruratan dan pembubaran serta Khatimah (penutup). Dalam organisasi sekarang disebut sebagai Anggaran Dasar (AD)

⁹ *Qanun Dakhili* merupakan landasan operasional yang memuat hal-hal yang lebih rinci, konkrit dan praktis. Dalam organisasi sekarang disebut sebagai Anggaran Rumah Tangga (ART)

¹⁰ PP Persis. *Op.Cit.*, 2005:25

Cabang, dan Pimpinan Jama'ah¹¹. Setiap pimpinan mempunyai tugas dan wewenang masing-masing yang bahkan kesemuanya tercantum jelas dalam Pedoman kerja Persis.

PD (Pimpinan Daerah) yang tidak hanya menjadi pembantu Ketua Umum dalam memimpin Jam'iyah ditingkat Kota/Kabupaten, tetapi juga mereka yang berperan penting dalam perkembangan Persis di tiap Kabupaten/ Kota setiap tahunnya.

PD Persis Kabupaten Bandung mempunyai peringkat kedua dalam perkembangan Jam'iyah nya. Hal ini tentu saja menjadi faktor awal dari adanya penelitian ini. Perkembangan Jam'iyah PD Persis Kabupaten Bandung tidak hanya disebabkan faktor geografis dan demografis semata, tetapi peran para tokoh-tokoh dan jamaah Persis dalam menegakkan apa yang menjadi landasan awal mereka masuk menjadi bagian Persis.

PD Persis Kabupaten Bandung dalam struktur organisasi sama halnya dengan apa yang terdapat dalam *Qanun Asasi* dan *Qanun Dakhili* Persis, yang mana dalam struktur organisasi Pimpinan Daerah (PD) Persis terdiri dari¹²; Ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, Bidang Garapan Pembinaan Pengembangan SDM dan Organisasi (Bidgar Binbang SDMO), Bidang Garapan Pendidikan, Bidang Garapan Dakwah, Bidang Garapan Bimbingan-Haji dan Umrah , Bidang Garapan Perwakafan, Bidang Garapan perzakatan, Bidang Garapan Pengembangan Sosial Ekonomi (Bidgar Bangsosek). Dalam setiap

¹¹ Pada Pasal 9 tentang Pimpinan, dalam buku *Qanun Asasi-Qanun Dakhili:Penjelasan Qanun Asasi-Qanun Dakhili, Pedoman kerja, Program Jihad 2005-2010*. Bandung : Pimpinan Pusat Persatuan Islam. Hlm: 9

¹² PP Persis. *Op.Cit.*, 2005 : 139

Bidang Garapan (Bidgar) mempunyai tugas masing-masing dalam perkembangan Jamiyyah Persis di Kabupaten Bandung, hasil yang dicapai adalah PD Persis Kabupaten Bandung berhasil mendirikan Cabangnya di 28 Kecamatan dari 31 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung¹³. Hal ini tentu saja menjadi prestasi tersendiri dalam perkembangan Persis.

PD Persis Kabupaten Bandung dalam struktur kepengurusannya mengalami 3 periode kepemimpinan¹⁴, namun ketiga pimpinan tersebut dalam masa jabatannya mengalami dua sampai tiga periode kepemimpinan. Perkembangan persis yang menjadi penelitian disini adalah ketika masa periode Didi Kuswandi dan Oom Surahman. Didi Kuswandi menjabat tahun 1983-1989, 1991-1995, dan 1995-2000. Masa Didi Kuswandi ini sebagai awal pendirian PD Persis di Kabupaten Bandung yaitu tahun 1983. Sedangkan Oom Surachman menjabat tahun 2001-2005 dan 2005-2009, pada masa kepemimpinan ini merupakan penerus dalam menggerakkan dakwah di Kabupaten Bandung. Masa Oom Surachman ini menjadi tempat bagi kemajuannya industri, sehingga di masa ini perkembangan Persis pun dalam beberapa bidang terpengaruhi untuk mencapai tujuannya.

Perkembangan ini terlihat dalam perkembangan jama'ah Persis di Kab. Bandung; yang mana pada awal kepengurusan Didi Kuswandi di tahun 1983-1989

¹³Hasil Wawancara dengan Ustadz.Zae Nandang. 27 Oktober 2010 pukul 12.00-13.00 WIB di kantor PD Persis Kabupaten Bandung di Kec.Pameungpeuk kabupaten Bandung.

¹⁴ Didi Kuswandi, H.Oom Surahman dan H.Zae Nandang. Hasil wawancara dengan Ustadz. Zae Nandang, 27 Oktober 2010 pukul 12.00-13.00 WIB di Kantor PD.Persis Kabupaten Bandung di Kec. Pameungpeuk Kabupaten Bandung.

berdiri 12 cabang¹⁵, yang pada bidang perkembangan organisasi yakni jama'ah Persis 731 orang, Persistri¹⁶ 781 orang, Pemuda Persis 324 orang dan Jamiyyatul Banaat¹⁷ 249 orang¹⁸. Tahun 1991-1996, bertambah 17 PC di Kabupaten Bandung sehingga jumlah PC yang berdiri sebanyak 29PC, dengan jumlah jama'ah Persis 2724 orang, Persistri 3345, Pemuda persis 499 orang, dan Pemudi Persis 457 orang.¹⁹ Pada periode berikutnya yakni tahun 1997-2000 perkembangan organisasi disebutkan bawa PD.Persis Kabupaten Bandung merupakan PD terbesar dan terluas wilayahnya, terdiri dari 30 PC setelah PC dimekarkan menjadi PD Persis Kotif Cimahi²⁰. Namun pada tahun 1997-2000 ini tidak disebutkan secara pasti jumlah anggota Persis se-Kabupaten Bandung.

Masa periode Oom Surachman periode 2001-2005 dan 2005-2009, perkembangan yang terjadi dalam keadaan jumlah anggota yang tentu saja semakin meningkat dan pendirian Cabang pun menjadi 34 Cabang. Perbandingan jumlah anggota terlihat pada awal kepemimpinannya dan akhir dari kepemimpinannya yang pertama (2001-2005). Di tahun 2001 jumlah anggota

¹⁵ 12 cabang ini terdiri dari Cabang Banjaran, Batujajar, Cigondewah, Cingcin, Ciwidey, Katapang, Pameungpek, Pameungpeuk Barat, Padalarang, Rahayu, soreang Kota dan soreang Muara.

¹⁶ Persatuan Islam Istri

¹⁷ Dalam buku QA dan QD tahun 1991, dijelaskan bahwa Jamiyyatul Banaat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Persis, berusaha membina, mendidik dan mengarahkan para wanita, khususnya di kalangan pemudi untuk memahami Al-qur'an dan as-sunnah Rasul,. Yang pada masa selanjutnya Jamiyyatul Banaat ini dikenal dengan sebutan Pemudi Persis. Hlm : 111-124

¹⁸ PD Persis Kabupaten Bandung.1991.*laporan Pertanggungjawaban PD.Persis Priangan Selatan Periode: 1983-1989, disampaikan pada: Musyawarah Daerah Persis Priangan Selatan Tanggal 4 Jumadiltsani 1410 H di Banjaran*. Bandung: Sekretariat PD.Persis. Hlm: 9

¹⁹ PD Persis Kabupaten Bandung. 1996. *laporan Pertanggungjawaban Pimpinan Daerah Persis Kabupaten Bandung masa jihad 1991-1996, disampaikan pada Musyawarah Daerah ke-3 PD.Persatuan Islam Kabupaten Bandung di Banjaran, 29 Desember 1996 M / 18 Sya'ban 1417 H*. Bandung: Sekretariat PD.Persis Hlm: 38

²⁰ PD Persis Kabupaten Bandung.2000. *Laporan Pertanggungjawaban Pimpinan Daerah Persatuan Islam masa jihad 1997-2000, disampaikan pada Musyawarah Daerah ke-4 PD Persatuan Islam Kabupaten Bandung di Banjaran, 14 Muharram 1422 H / 08 April 2001*. Bandung: Sekretariat PD.Persis.Hlm : 5.

Persis 3792 orang, Persistri 2896 orang, Pemuda Persis 1344 orang, dan pemuda Persis 1154 orang. Di tahun 2005 jumlah anggota persis 4214 orang, Persistri 4528 orang, Pemuda Persis 1916 orang, dan Pemuda Persis 1622 orang²¹.

Masa kepemimpinan Oom Surachman selanjutnya (Tahun 2005-2009), mengalami penurunan dan penambahan jumlah anggota yang mana di tahun 2005 tercatat jumlah anggota Persis 3363 orang, Persistri 3761 orang, Pemuda Persis 1670 orang dan Pemuda Persis 1430 orang. Di tahun 2009, tercatat jumlah anggota Persis 3796 orang, Persistri 4486 orang, Pemuda 1742 orang, dan Pemuda persis 1451 orang²². Yang mana dengan adanya terjadi pemekaran pada Kecamatan di Kabupaten Bandung, maka berpengaruh pula pada jumlah PC yang ada.

PD Persis Kabupaten Bandung tidak selalu mengalami kemajuan, kemunduran pun pernah terjadi baik itu dari segi anggota ataupun dalam dakwah dan pendidikan. Kemajuan dan kemunduran yang terjadi pada setiap periode nya, menuntut para pengurus PD Persis Kabupaten Bandung untuk menghadapi dan mencoba mengatasi sekaligus memberikan solusi dari tantangan dan hambatan yang terjadi dalam perkembangan jamiyyah Persis. Hal ini tentu saja menjadi perbandingan dalam setiap periode kepemimpinan dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dalam masa kepemimpinannya. Perkembangan dan penurunan anggota jami'yyah Persis di Kabupaten Bandung tentu saja berpengaruh pada perkembangan dakwah dan pendidikan di lingkungan Persis.

²¹ PD Persis Kabupaten Bandung. 2005. *laporan Pertanggungjawaban Pimpinan Daerah Persatuan Islam Kabupaten Bandung masa jihad 2001-2005, disampaikan pada Musyawarah Daerah V (Musyda v) PD.Persis Kabupaten Bandung. Pameungpeuk, 15 Mei 2005 / 6 Rabiultsani 1426 H.* Bandung: Sekretariat PD.Persis.Hlm: 38

²² PD Persis Kabupaten Bandung. 2005. *Op.Cit.*, . Hlm:65

Maka berdasarkan hal tersebut, penulis ingin meneliti lebih jauh tentang Perkembangan Persis pada tingkat PD Persis Kabupaten Bandung. Dengan itu penulis membuat judul dari penelitian ini yaitu PERKEMBANGAN PERSATUAN ISLAM (PERSIS) DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 1983-2009.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas maka timbul pertanyaan-pertanyaan yang menjadi masalah dalam penelitian ini. Masalah yang dimaksudkan yaitu :

1. Bagaimana awal berdirinya PD Persis Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana perkembangan Persis di Kabupaten Bandung tahun 1983-2009?
3. Bagaimana para pengurus PD Persis Kabupaten Bandung dalam mengatasi tantangan dan hambatan pada masa kepemimpinannya?

C. Tujuan penelitian

Sesuai dengan apa yang telah diuraikan dalam perumusan masalah, maka penulisan ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui awal berdirinya PD Persis Kabupaten Bandung
2. Untuk mengetahui perkembangan Persatuan Islam di Kabupaten Bandung tahun 1983-2009
3. Untuk mengetahui strategi para pengurus PD Persis Kabupaten Bandung dalam mengatasi tantangan dan hambatan pada masa kepemimpinannya

D. Langkah-langkah Penelitian

Dalam penyusunan ini penulis menggunakan metode penelitian sejarah (*Historical Method*). Metode tersebut adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau²³. Langkah-langkah yang ditempuh oleh penulis dalam penelitian ini sesuai dengan metode penelitian sejarah, yang terbagi menjadi empat yaitu:

1. Heuristik

Heuristik merupakan tahapan mengumpulkan informasi²⁴ atau keterampilan dalam menemukan sumber²⁵ yang dikumpulkan sesuai dengan sejarah yang akan ditulis.

Adapun cara yang ditempuh oleh peneliti dalam menghimpun data-data sumber sejarah adalah dengan menemukan sumber-sumber tertulis yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara. Pada tahap ini penulis banyak mengumpulkan literatur buku-buku yang relevan, dengan mencari buku-buku tersebut di perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Perpustakaan Daerah yang terletak di Jln. Soekarno-Hatta, kantor PP PERSIS di Jln. Perintis Kemerdekaan No.2 Bandung, Kantor PD PERSIS Kabupaten Bandung di Kap. Langonsari Indah RT 01/Rw 04 Kec. Pameungpeuk Kabupaten Bandung. dan melakukan wawancara dengan para tokoh yang terkait dalam penelitian ini.

²³Louis Gottscalk. 1995. *Mengerti Sejarah* (Terjemahan Nograho Notosusanto). Jakarta: UI Press. Hlm:32

²⁴ *Ibid.*, Louis Gottscalk, Hlm. 35.

²⁵ Dudung Abdurrahman. 1999. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. Hlm. 55.

Adapun sumber yang didapatkan terbagi kedalam beberapa bagian:

a. Dokumen / Arsip

1. Kamaludin (Ka.Bidgar Perzakatan PP Persatuan Islam),
'Operasionalisasi Pengelolaan zakat Persatuan Islam dalam kerangka UU.No.38/1999' (Makalah).
2. PD Persis Kabupaten Bandung. 1990. *Laporan Pertanggungjawaban PD Persis Priangan Selatan Periode 1983-1989, disampaikan pada Musyawarah Daerah Persis Priangan Selatan Tanggal 4 Jumadiltsani 1410 H di Banjaran*. Bandung: Sekretariat PD.Persis Priangan Selatan
3. PD Persis Kabupaten Bandung. 1991. *Laporan Pertanggungjawaban PD Persis Priangan Selatan Periode: 1983-1989, disampaikan pada: Musyawarah Daerah Persis Priangan Selatan Tanggal 4 Jumadiltsani 1410 H di Banjaran*. Bandung: Sekretariat PD Persis Kabupaten Bandung
4. PD Persis Kabupaten Bandung. 1996. *Laporan Pertanggungjawaban Pimpinan Daerah Persis Kabupaten Bandung masa jihad 1991-1996, disampaikan pada Musyawarah Daerah ke-3 PD.Persatuan Islam Kabupaten Bandung di Banjaran, 29 Desember 1996 M / 18 Sya'ban 1417 H*. Bandung: Sekretariat PD Persis Kabupaten Bandung
5. PD Persis Kabupaten Bandung. 2000. *Laporan Pertanggungjawaban Pimpinan Daerah Persatuan Islam masa*

jihad 1997-2000, disampaikan pada Musyawarah Daerah ke-4 PD Persatuan Islam Kabupaten Bandung di Banjaran, 14 Muharram 1422 H / 08 April 2001. Bandung: Sekretariat PD Persis Kabupaten Bandung

6. PD Persis Kabupaten Bandung. 2005. *Laporan Pertanggungjawaban Pimpinan Daerah Persatuan Islam Kabupaten Bandung masa jihad 2001-2005, disampaikan pada Musyawarah Daerah V (Musyda v) PD.Persis Kabupaten Bandung. Pameungpeuk, 15 Mei 2005 / 6 Rabiulatsani 1426 H. Bandung: Sekretariat PD Persis Kabupaten Bandung*

7. PD Persis Kabupaten Bandung. 2009. *Laporan Pertanggungjawaban Pimpinan Daerah Persatuan Islam (Persis) Kabupaten Bandung Masa Jihad 2005-2009, Disampaikan pada Musyawarah Daerah VI Persatuan Islam Kabupaten Bandung. Ahad, 21 Jumadil ula 1430H/17 Mei 2009 M. Bandung: Sekretariat PD Persis Kabupaten Bandung*

8. PP Persis. 1991. *Qanun Asasi/Qanun Dakhili Persis; Qaidah persistri, Qaidah Asasi-Qaidah Dakhili Pemuda Persis, Qaidah Jam'iyatul Banaat, Kaifiyyah Kerja Dewan Hisbah, Pedoman Kerja Persis. Bandung : Sekretariat PP Persis*

9. PP Persis. 1996. *Qanun Asasi, Qanun Dakhili, Pedoman kerja, Kaifiyah Kerja Dewan Hisbah Persatuan Islam. Bandung : Sekretariat PP Persis*

10. PP Persis. 2005. *Qanun Asasi-Qanun Dakhili: Penjelasan Qanun Asasi-Qanun Dakhili, Pedoman kerja, Program Jihad 2005-2010*. Bandung: PP Persis

11. 'Reorientasi Wajah Dan Wjihah Pesantren Persis' (makalah), kesimpulan hasil seminar kependidikan PD Persis Kabupaten Bandung

12. Surat Edaran Zakat, Infaq dan Shadaqah, No: 2792/JJ-C3/PP/2004

13. Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Pengembangan SDM&O PD.Persis Kabupaten Bandung

14. Tehnis Pengelolaan Zakat: Hasil Pelatihan Kader pengelola Lembaga zakat Persatuan Islam. 22-24 Juni 2002 di Lembang Kabupaten Bandung.

b. Buku

1. Al-Ghifari, Abu. 2002.*Sejarah Pemuda Persis*. Bandung : Mujahid Press

2. Anshary, Isa. 1958. *Manifes Perjuangan Persatuan Islam*. Bandung : Pusat Pimpinan Persatuan Islam

3. Khairuman, Badri. 2002. *Pandangan Keagamaan Persis sejarah, Pemikiran dan fatwa Ulamanya*. Bandung: Granada

4. Muchtar, A Latief. 1998. *Gerakan Kembali ke Islam : Warisan terakhir A.Latief Muchtar Ketua Umum Persis 1983-1997*. Bandung : Remaja Rosdakarya

5. Noer, Deliar. 1996. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta : LP3ES
6. Wildan, Dadan. 1995. *Sejarah Perjuangan Persis 1923-1983*. Bandung : Gema Syahida
7. _____. 1997. *Yang Da'i Yang Politikus*. Bandung : Rosdakarya

c. Wawancara

1. Didi Kuswandi selaku Ketua PD Persis Kabupaten Bandung Masa Jihad 1983-1989, 1991-1995, dan 1996-2000.
2. Oom Surachman selaku Ketua PD Persis Kabupaten Bandung Periode 2000-2005 dan 2005-2009
3. Zae Nandang selaku Ketua PD Persis Kabupaten Bandung 2009-2013 dan Bidgar Da'wah Tahun 2005-2009
4. Munir Thohir, S.Ag; selaku wakil Bidgar Dakwah pada periode 2005-2009 dan 2009-2013
5. Okan Sukana, 50 tahun. anggota jamaah Persis cabang Banjaran
6. Suhaeni, 47 tahun. Anggota Persistri cabang Banjaran

2. Kritik

Tahapan ini merupakan pengujian terhadap sumber-sumber melalui kritik. Dalam pengujian kritik terhadap sumber sejarah mempunyai dua aspek, yaitu kritik ekstern dan kritik intern²⁶. Kritik ekstern adalah untuk

²⁶ E. Kosim, *Metode Sejarah: Asas dan Proses*, Unpad, 1984. Hlm: 39

mengetahui keotentikan suatu sumber termasuk menyelidiki bentuk sumber. Sementara itu kritik intern adalah untuk mengetahui kredibilitas suatu data. Dengan kritik yang tajam, maka dapat dipercaya kebenaran dan ketelitiannya. Kritik intern berusaha membuktikan adanya kesaksian yang diberikan oleh sumber itu dapat dipertanggungjawabkan dan dipercayai.²⁷

Jadi pada tahap ini penulis melakukan kritik ekstern dan intern terhadap sumber-sumber yang diperoleh. Hal ini bertujuan agar memperoleh fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun sumber awal yang penulis gunakan adalah buku yang dikeluarkan oleh PP.Persis mengenai *Qanun Asasi/Qanun Dakhili Persis; Qaidah persistri, Qaidah Asasi-Qaidah Dakhili Pemuda Persis, Qaidah Jam'iyatul Banaat, Kaifiyyah Kerja Dewan Hisbah, Pedoman Kerja Persis (1991)*. Kedua yang dikeluarkan tahun 1996 yaitu *Qanun Asasi, Qanun Dakhili, Pedoman kerja, Kaifiyah Kerja Dewan Hisbah Persatuan Islam*. Dan yang ketiga dikeluarkan tahun 2005 *Qanun Asasi-Qanun Dakhili: Penjelasan Qanun Asasi-Qanun Dakhili, Pedoman kerja, Program Jihad 2005-2010*. Dalam buku ini disebutkan landasan Qanun Asasi merupakan landasan ideologi, yang mana memuat tentang hal-hal yang mendasar mencakup didalamnya antara lain Wajah dan wijhah Persis yang terdiri dari nama, waktu dan kedudukan, asas, tujuan, sifat, dan rencana jihad; Jama'ah, Imamah dan imarah yang mengatur struktur kepemimpinan, pembedangan dan kelembagaan serta permusyawaratan,

²⁷ *Ibid.*, Hlm:39-41

dan diakhiri dengan aturan mengenai kekayaan dan pembiayaan, kedaruratan dan pembubaran serta Khatimah (penutup). Sedangkan *Qanun Dakhili* merupakan landasan operasional yang memuat hal-hal yang lebih rinci, konkrit dan praktis (dalam *Qanun Dakhili* ini diterangkan bab dan pasal yang bersangkutan dengan kejam'iyahan Persis).

Dalam memenuhi penggunaan sumber yang sangat menunjang dalam penulisan penelitian ini ialah Arsip PD Persis Kab Bandung berupa; *Laporan Pertanggungjawaban PD Persis Priangan Selatan Masa Jihad 1983-1989, Laporan Pertanggungjawaban PD Persis Kabupaten Bandung Masa Jihad 1991-1995, Laporan Pertanggungjawaban PD Persis Kabupaten Bandung Masa Jihad 1995-2000, Laporan Pertanggungjawaban PD Persis Kabupaten Bandung Masa Jihad 2000-2005 dan Laporan Pertanggungjawaban PD Persis Kabupaten Bandung Masa Jihad 2005-2009*. Kesemua laporan *Laporan Pertanggungjawaban* tiap masa Jihad membantu penulis dalam mengetahui perkembangan Persis di Kabupaten Bandung, karena dalam laporan ini disebutkan hal-hal yang telah dilaksanakan oleh setiap Bidang garapan di jam'iyah PD Persis Kabupaten Bandung. Bidang garapan yang ada dalam kejam'iyahan PD Persis Kabupaten Bandung ini yang terbagi kepada tiga bagian, *pertama* Bidang jam'iyah yang mempunyai Bidang Garapan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Organisasi (Bidgar SDM&O). *Kedua*, Bidang Tarbiyah yang terdiri dari beberapa bidang garapan seperti Bidgar Pendidikan, Bidgar dakwah, dan Bidgar Bimbingan Haji dan

Umrah. *Ketiga* adalah bidang Maliyah, yang mana terbagi pada Bidgar Perwakafan, Bidgar Perzakatan, dan Bidgar Sosial-Ekonomi.

Arsip selanjutnya yang didapatkan penulis adalah lembaran-lembaran SK (Surat Keputusan) mengenai hal-hal yang bersangkutan dalam kejam'iyahan Persis dalam hal ini seperti; Perihal Pengesahan Pimpinan Daerah Persatuan Islam Kabupaten Bandung Masa Jihad 1996-2000, Pengangkatan Pembantu Bidang Garapan Pimpinan Daerah Persatuan Islam Kabupaten Bandung, Pengesahan Pengurus Himpunan Wiraswasta Persatuan Islam (HIWAPI) Pimpinan Daerah Persatuan Islam Kabupaten DT II Bandung, Pengesahan Tasykil Lajnah Bantuan Hukum (LBH) Persis Daerah Kabupaten Bandung, Tentang Pendiri dan Pengelola Perpustakaan Al-Harakah Pimpinan Daerah Persatuan Islam Kabupaten Bandung, dan mengenai Surat Edaran Zakat, Infaq dan Shadaqah.

Sumber buku yang menjadi pendukung dalam tulisan ini, penulis ambil dari karya K.H.M. Isa Anshary yang berjudul *Manifes Perjuangan Persatuan Islam* (1958). Dalam buku ini dituliskan analisa dan filosofi perjuangan Persis yang mana ditujukan untuk memenuhi harapan dan keinginan Persatuan Islam kepada masyarakat ramai terutama umat Islam, yang mana bisa dijadikan bahan pikiran dan pedoman-tinjauan, agar masyarakat dapat menilai dengan wajar atas keyakinan dan perjuangan Persatuan Islam²⁸.

²⁸ Isa Anshory. 1958. *Manifes Perjuangan Persatuan Islam*. Bandung : Pimpinan Pusat Persatuan Islam. Hlm: 9

Adapun buku yang penulis gunakan untuk sejarah awal terbentuknya Persis, tokoh-tokoh yang terlibat, dan perkembangan Persis dari awal berdirinya diambil dari buku Badri Khairuman yang berjudul *Pandangan Keagamaan Persis sejarah, Pemikiran dan fatwa Ulamaanya*. (2002), Deliar Noer dengan judul *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* (1996), dan Dadan Wildan dengan judul buku *Sejarah Perjuangan Persis 1923-1983 dan Yang Da'i Yang Politikus*.

Dalam Sumber Lisan yang penulis penuhi adalah mereka yang secara langsung menjabat dalam struktur PD Persis Kabupaten Bandung dari tahun 1983-2009, yaitu Didi Kuswandi menjabat tahun 1983-1989, 1991-1995, dan 1995-2000. Sedangkan Oom Surachman menjabat tahun 2001-2005 dan 2005-2009. Sebagai sumber lisan pendukung adalah Zae Nandang selaku Ketua PD Persis Kabupaten Bandung 2009-2013 dan Bidgar Da'wah Tahun 2005-2009, Munir Thohir; selaku wakil Bidgar Dakwah pada periode 2005-2009 dan 2009-2013, Okan Sukana selaku anggota Persis cabang Banjaran dan Suhaeni selaku anggota Persistri cabang Banjaran.

3. Interpretasi

Interpretasi atau penafsiran sejarah adalah dalam rangka analisis dan sintesis. Pada tahapan ini hal yang dilakukan adalah berusaha merangkaikan fakta-fakta itu menjadi sesuatu keseluruhan yang harmonis, dan menentukan jenis pendekatan penulisan.

Sejarah sosial mempunyai beberapa pembahasan yang banyak yang mencakup akan sejarah perjuangan golongan sosial, gerakan sosial, sejarah demografis, sejarah kota, dan mencakup pula perkembangan golongan-golongan sosial. Hal lain yang menjadi tema pokok dari bidang sejarah sosial adalah perubahan sosial, jika proses sejarah dipandang dari perspektif sejarah sosial merupakan proses perubahan sosial dalam berbagai dimensi atau aspeknya²⁹.

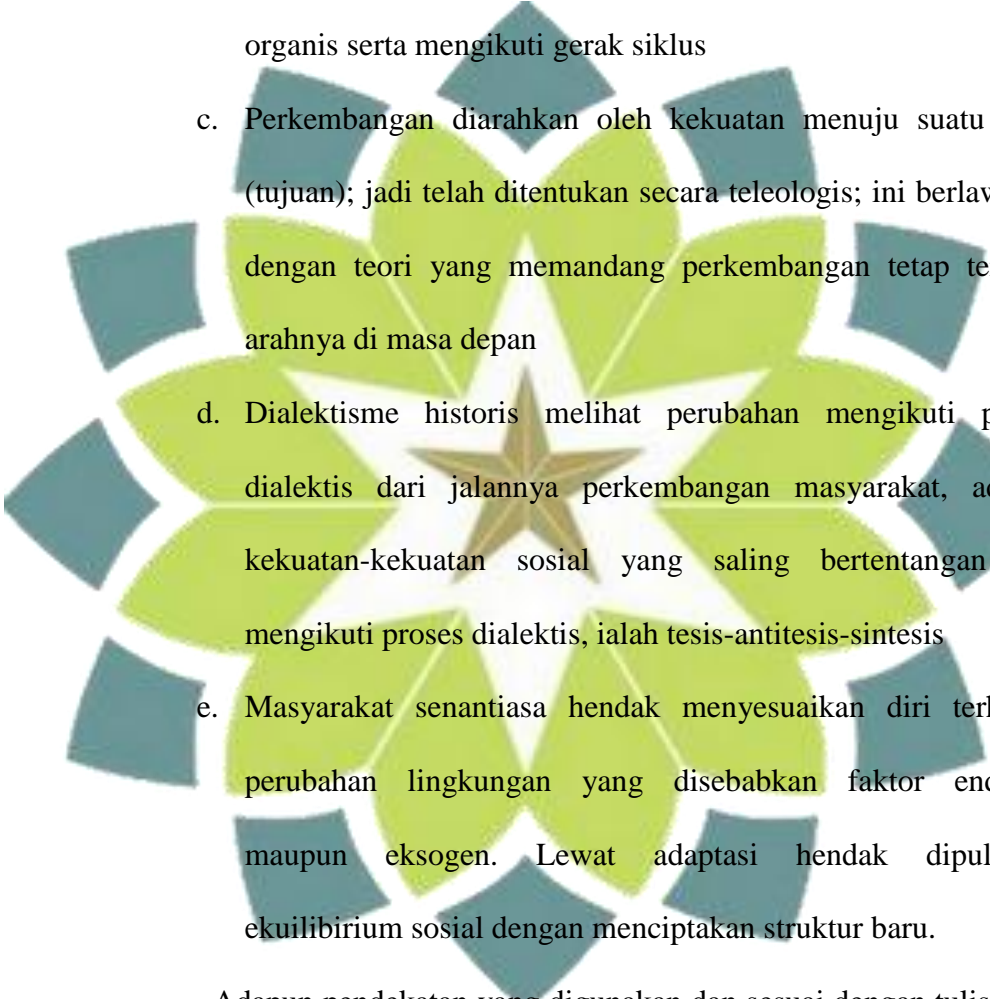
Dengan dipandang sebagai proses modernisasi, perubahan sosial mencakup permasalahan-permasalahan yaitu proses akulturasi, lalu muncul proses seleksi, lalu munculnya perubahan dari heterogenitas yang inkoheren ke heterogenitas yang koheren, adanya transformasi structural yang merupakan proses pokok dari modernisasi, adapula transformasi structural yang adanya proses integrasi dan disintegrasi, atau disorganisasi dan reorganisasi yang silih berganti, adapula proses strukturasi hubungan sosial dalam masyarakat yang kompleks menimbulkan jaringan sosial yang mencakup interdependensi antara berbagai sektor atau fungsi masyarakat yang menimbulkan suatu sistem, dan yang terakhir adanya perubahan sosial yang merupakan gejala inheren dalam setiap perkembangan atau pertumbuhan³⁰.

Dalam perubahan sosial ini muncul beberapa teori yang dapat dipergunakan sebagai paradigma³¹;

²⁹ Sartono Kartodirdjo. 1993. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka utama. Hlm: 157-158

³⁰ *Ibid.*, Hlm: 160-162

³¹ *Ibid.*, Hlm: 162-163

- 
- a. Evolucionisme, menggambarkan perkembangan masyarakat bergerak secara unilinear, yang mengikuti jenjang tahap demi tahap menuju ke arah kemajuan (progresif), ke arah yang semakin sempurna
 - b. Adanya perkembangan yang digambarkan seperti pertumbuhan organis serta mengikuti gerak siklus
 - c. Perkembangan diarahkan oleh kekuatan menuju suatu telos (tujuan); jadi telah ditentukan secara teleologis; ini berlawanan dengan teori yang memandang perkembangan tetap terbuka arahnya di masa depan
 - d. Dialektisme historis melihat perubahan mengikuti proses dialektis dari jalannya perkembangan masyarakat, adanya kekuatan-kekuatan sosial yang saling bertentangan dan mengikuti proses dialektis, ialah tesis-antitesis-sintesis
 - e. Masyarakat senantiasa hendak menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan yang disebabkan faktor endogen maupun eksogen. Lewat adaptasi hendak dipulihkan ekuilibrium sosial dengan menciptakan struktur baru.

Adapun pendekatan yang digunakan dan sesuai dengan tulisan ini ialah melalui pendekatan Model Evolusi³². Model ini menunjukkan jenis penulisan yang melukiskan perkembangan sebuah masyarakat itu berdiri

³² Kuntowijoyo. 2005. *Metodologi Sejarah*. Jogjakarta: Tiara Wacana. Hlm: 47

sampai menjadi sebuah masyarakat yang kompleks³³, atau menggambarkan perkembangan masyarakat bergerak secara unilinear, yang mengikuti jenjang tahap demi tahap menuju ke arah kemajuan (progresif), ke arah yang semakin sempurna.

Soerjono Soekanto menyebutkan tentang kategori-kategori organisasi, organisasi merupakan suatu cara untuk mengumpulkan tenaga serta membagi-bagikan kekuasaan dan wewenang, dilihat dari pembagian kekuasaan tersebut maka dalam suatu organisasi terdapat pembagian tugas. Pembagian tugas kekuasaan yang cocok bagi organisasi ini adalah pembagian tugas horizontal.³⁴

Pembagian kekuasaan yang horizontal tidak menyebabkan perbedaan tingkat kedudukan, tetapi lebih ditekankan pada pembagian kekuasaan dan wewenang secara mendatar yang terutama dilandaskan pada pembagian kerja secara spesialisasi. Setiap bagian dari pembagian kerja dan spesialisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya dikoordinasi oleh kedudukan yang lebih tinggi derajatnya dan terus berlanjut seterusnya hingga ke atas³⁵.

Orang-orang yang berada di organisasi senantiasa merasa dirinya sebagai bagian dari satu kesatuan, dan tersedia pula bagi mereka peraturan-peraturan bagi anggotanya. Dalam hal ini pun ada pengerahan tenaga yang dimaksudkan sebagai pengaturan tenaga-tenaga secara organisatoris untuk melaksanakan suatu kerja tertentu. Tenaga-tenaga

³³ *Ibid.*, Hlm: 47

³⁴ Soerjono Soekanto. 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Hlm: 393

³⁵ *Ibid.*, Hlm: 393

tersebut dikerahkan secara teratur, yang berarti di atas landasan tata tertib tertentu atau atas dasar peraturan-peraturan tersendiri. Dalam tata tertib ini, seseorang akan tahu tempatnya di dalam lingkungan pekerjaan, hubungan kerja dengan lain-lain bagian atau pejabat, beserta bertanggung jawab³⁶.

Adapun untuk kelengkapan informasi dari suatu dokumen yang ada diperkuat dengan dilakukannya wawancara narasumber yang terkait dan berperan dalam perkembangan Persatuan Islam di Kabupaten Bandung.

Persatuan Islam (Persis) yang didirikan pada 12 September 1923³⁷ di Bandung, sebagai organisasi dan kelembagaan Islam modern di Indonesia. Jam'iyah Persis yang bersifat "*Harakah Tajdid*" dalam pemikiran ke-Islaman dan penerapannya. Bahkan bergerak dalam bidang Da'wah, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan lainnya menurut tuntunan al-Qur'an dan as-Sunnah. Sehingga dalam bentuknya, persis berusaha *Bunyanun Marshush* dalam hidup berjamaah, berimamah, dan berimarah seperti yang dicontohkan Rasulullah Saw³⁸.

Oleh karenanya, walaupun dalam perkembangan organisasi pada masa itu tidak menjadi perhatian utama, dan dikhususkan dalam mengembalikan umat Islam kepada ajaran Quran dan Sunnah. Tapi, pada dasarnya perkembangan jam'iyah Persatuan Islam terlihat bertambah jelas dalam perkembangan berdirinya setiap Pimpinan Jama'ah yang menjadi tingkat terkecil dalam Pimpinan Cabang Persatuan Islam yang berdiri di

³⁶ *Ibid.*, Hlm: 394-395

³⁷ PP Persis. *Op.cit.* 2005 . Hlm: 25

³⁸ PP Persis. 2005. *Op.Cit.*, Hlm: 7. Disebutkan dalam BAB I Wajah dan Wjihah, pasal 4(Bentuk, sifat dan Gerakan) poin 1-3

setiap Kecamatan. Dalam kejam'iyahan Persis, bahwasanya memiliki lima (5) Pimpinan Jam'iyah yang berdasarkan klasifikasi wilayah kepemimpinan. *Pertama*, Pimpinan Pusat (disingkat PP, untuk ditingkat Pusat). *Kedua*, Pimpinan Wilayah (disingkat PW, untuk tingkat Provinsi). *Ketiga*, Pimpinan Daerah (disingkat PD, untuk tingkat Kabupaten). *Keempat*, Pimpinan Cabang (disingkat PC, untuk tingkat Kecamatan). Dan *Kelima*, Pimpinan Jamaah (disingkat PJ, untuk tingkat lingkungan pemukiman yang terdapat sedikitnya tiga orang anggota).

Agar terwujudnya kelancaran jam'iyah, maka diadakan pembidangan yang dari setiap bidang dapat dibagi menjadi beberapa Bidang Garapan (disingkat Bidgar) sesuai kebutuhan³⁹. Seperti Bidang Garapan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Organisasi (Bidgar SDM&O), Bidang Garapan Pendidikan, Bidang Garapan Dakwah, Bidang Garapan Bimbingan Haji dan Umrah, Bidang Garapan Perwakafan, Bidang Garapan Perzakatan, dan Bidang Garapan Sosial-Ekonomi. Yang kesemua Bidang Garapan mempunyai tugas dan kewajiban yang telah ditentukan.

Ranah penelitian dalam tulisan ini adalah Pimpinan Jam'iyah di tingkat Kabupaten atau disebut dengan Pimpinan Daerah (PD), adapun yang menjadi wilayah penelitiannya adalah Kabupaten Bandung dengan pengambilan tahun 1983-2009 Sehingga dalam penelitian ini dikhususkan pada PD Persis Kabupaten Bandung tahun 1983-2009.

³⁹ PP Persis. 2005. *Op.Cit.* Hlm: 9. Bahwasanya Struktur Organisasi pada setiap Pimpinan Jam'iyah hampir sama, hal ini dapat dilihat dalam struktur organisasi PP Persatuan Islam Masa jihad 2005-2010, Hlm:137-140

PD Persis Kabupaten Bandung ini berdiri tahun 1983, dalam kepemimpinannya terbagi pada dua periode, yakni periode Didi Kuswandi yang menjabat tahun 1983-1989, 1991-1995, dan 1995-2000. Dan periode Oom Surachman yang menjabat tahun 2001-2009. Perkembangan dalam setiap bidang dapat terlihat pada Laporan Pertanggungjawaban setiap periode, hal ini menjadi gambaran jelas dalam perkembangan Persatuan Islam itu sendiri di wilayah Kabupaten Bandung. Namun terlepas dari perkembangan yang terjadi, dalam setiap kepemimpinan mengalami hambatan ataupun rintangan yang mengubah kuantitas ataupun kualitas dari Persatuan Islam di Kabupaten Bandung.

4. Historiografi

Pada tahap penulisan ini dibagi kepada beberapa bab yang masing-masing merupakan satu kesatuan uraian yang saling berkaitan serta saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Adapun uraian bab-bab tersebut meliputi :

Bab I, merupakan pendahuluan yang didalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan langkah-langkah penelitian.

Bab II. Sejarah Berdirinya Persis di Kabupaten Bandung. pada bab ini akan digambarkan mengenai kondisi geografis, dan kondisi sosial-keagamaan masyarakat Kabupaten Bandung. lalu akan dituliskan dari Sejarah berdirinya Persis; tahapan ini akan dituliskan Persis pada awal

kemunculannya hingga sampai berdirinya Persis ke setiap wilayah dan Kabupaten/ kota, yang pada akhirnya akan dituliskan awal kemunculannya PD Persis Kabupaten Bandung yang menjadi ranah penelitian ini, struktur kepengurusan, program kerja dari setiap periode kepemimpinan, dan tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan Persis di Kabupaten Bandung.

Bab III Pada bab ini akan dituliskan mengenai perkembangan PD Persis Kabupaten Bandung dengan dipandang dari setiap masa kepemimpinan Didi Kuswandi dan masa kepemimpinan Oom Surachman. Yang mana masa kepemimpinan Didi Kuswandi berlangsung dari tahun 1983-2000 sedangkan Oom Surachman berlangsung dari tahun 2001-2009. Pada kedua kepemimpinan tersebut akan dilihat perkembangannya dari setiap Bidgar yang dibentuk dalam masa setiap kepemimpinannya. Bidgar-Bidgar yang sudah tercantum dalam Qanun Asasi dan *Qanun Dakhili* yang telah ditetapkan oleh PP Persis Kabupaten Bandung adalah Bidang Garapan Penyiaran Publikasi, Bidang Garapan Pendidikan/ Tarbiyyah, Bidang Garapan Tabligh/ Da'wah, Bidang Garapan Bimbingan Haji dan Umrah, Bidang Garapan Perwakafan, Bidang Garapan Perzakatan, Bidang Garapan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan Bidang Garapan Sosial Ekonomi. Dan yang terakhir mencoba memperbandingkan solusi dalam menghadapi tantangan dan Hambatan pada kedua periode ini yakni masa Didi kuswandi dan Oom Surachman.

Bab IV. Dalam bab penutup ini penulis melakukan simpulan dari penulisan penelitian ini, dan tidak lupa pula penulis melakukan analisis yang penulis cari dari adanya penelitian ini. Sehingga akan diketahui pula perkembangan Persis di Kabupaten Bandung yang melaju pesat dan memperoleh peringkat kedua dalam pengakuan Jam'iyah Persis di Indonesia.

